

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah, antara lain melalui: Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Inpres Desa Tertinggal (IDT), mengembangkan IDT menjadi Program Pengembangan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Padat karya, dan pada tahun 2000 pemerintah Indonesia mengembangkan program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat yang dikenal dengan Kecamatan Development Program (KDP) dan Urban Poverty Program (UPP) yang kemudian disatukan menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan pengembangan yang lebih luas dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan

kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasionalnya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Dan diantara bentuk pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah melalui pemanfaatan simpan pinjam untuk perempuan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan dan salah satu sasarannya adalah masyarakat miskin di pedesaan.(Azhar : 2013)

Salah satu kegiatan dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bareng adalah mengembangkan dan mengelola dana bergulir yang memberikan kemudahan bagi Rumah Tenaga Miskin (RTM) untuk mendapatkan permodalan atau kredit dalam bentuk pinjaman kegiatan SPP dan UEP, dimana dana bergulir ini adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman yang dikelola oleh Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha dengan prosedur dan persyaratan yang sangat mudah dan bunga yang

terjangkau serta tanpa agunan/jaminan. Tetapi pada tahun 2014 PNPM Mandiri Pedesaan melaksanakan program baru yaitu konvensional seperti yang dilakukan oleh bank, koperasi kelembagaan keuangan lainnya dengan syarat agunan/jaminan berupa BPKB atau sertifikat tetapi tidak berjalan lancar karena hanya ada dua nasabah yang mengajukan kredit.

Tabel 1.1
Data Kredit Macet PNPM-Mpd Kecamatan Bareng
Tahun 2015

No	Desa	Kelompok	Jumlah Piutang	Bunga (%)	Tertagih	Macet
1	Kebondalem	Melati putih II B Kebondalem (SPP)	37.500.000	1%	27.410.750	10.089.250
2	Karangan	Kel arisan jum'at 1 Karangan (UEP)	38.000.000	1%	37.085.000	915.000
3	Mojotengah	Kel PKK Karang anyar mojotengah (UEP)	19.000.000	1%	16.100.000	2.900.000
4		Kel Sejahtera Bersama mojotengah (UEP)	16.000.000	1%	12.725.800	3.274.200
5	Banjaragung	Kel PKK Dsn Banjarjo (UEP)	36.000.000	1%	31.250.000	4.750.000
	Jumlah		146.500.000		124.571.550	21.928.450

Sumber : PNPM-Mpd di Kecamatan Bareng

Tabel 1.2
Data Kredit Macet PNPM-Mpd Kecamatan Bareng
Tahun 2016

No	Desa	Kelompok	Jumlah Piutang	Bunga (%)	Tertagih	Macet
1	Kebondalem	Melati Putih II A Kebondalem (SPP)	32.000.000	1%	28.065.000	3.935.000
2	Kebondalem	Kel Dagang	13.500.000	1%	12.175.000	1.325.000

	dalem	Kedungsuruh Kebondalem (UEP)				
3	Kebondalem	Kelompok PKK Plosorejo (UEP)	19.000.000	1%	17.675.000	1.325.000
4	Mundusewu	Kel. PKK Sidowayah 1 Mundusewu (SPP)	21.000.000	1%	18.965.500	2.034.500
5	Mojotengah	Konv. a/n p. widia susandi (Konv)	100.000.000	1%	76.893.200	23.106.800
6		Pinjmn Konv. a/n B.Kurniasih (Konv)	50.000.000	1%	22.473.900	27.526.100
7	Ngrimbi	Kel. PKK Dsn Mutersari Ngrimbi (SPP)	27.000.000	1%	22.760.000	4.240.000
8		Kel. Muslimat mutersari (SPP)	10.500.000	1%	9.545.000	955.000
9		Kel. Yasin III Ngrimbi (SPP)	24.500.000	1%	17.475.000	7.025.000
10	Nglebak	Kel. Paguyuban Tani (UEP)	30.000.000	1%	23.300.000	6.700.000
	Jumlah		327.500.000		249.327.600	78.172.400

Sumber : PNPM-Mpd di Kecamatan Bareng

Dari Tabel 1.1 dan 1.2 dapat dilihat sebagian besar pinjaman bermasalah kredit yang dilakukan oleh nasabah PNPM-Mpd mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Pada tahun 2015 dari 5 desa dengan program SPP dan UEP nasabah kredit macet. Sedangkan pada tahun 2016 dari 7 desa dengan program SPP, UEP dan konvensional nasabah kredit macet. Program konvensional baru dilaksanakan tahun 2014 mengalami kredit bermasalah pada tahun 2016.

Timbulnya kredit macet sendiri disebabkan oleh para nasabah yang tidak mau membayar kewajibannya karena adanya faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Berdasarkan yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kredit macet “ANALISIS KREDIT MACET PADA PNPM-Mpd di Kecamatan Bareng”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah faktor apa saja yang menyebabkan kredit macet ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan, maka diperlukan batasan-batasan masalah dalam penelitian ini. Sehingga bisa mengetahui penyebab kredit macet dari tahun ke tahun.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kredit macet pada PD. BPR Bank Jombang denga

1.5 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu :

1. Bagi pihak perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan sebagai usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan.

2. Bagi pihak peneliti, hasil penelitian ini merupakan hasil karya ilmiah yang digunakan sebagai pengimplementasian ilmu akuntansi yang diperoleh selama dibangku kuliah ke dunia kerja nyata.
3. Bagi akademis, dapat digunakan sebagai sarana penambahan khasanah ilmu pengetahuan serta menambah koleksi perpustakaan yang diharapkan dapat memperkaya wawasan mahasiswa dan dapat dipakai sebagai pijakan penelitian yang sama.